

Judul : KPK tidak akan pandang bulu
Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2



Bekas Direktur Pemeriksaan dan Penegihan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, sesuai permintaan keterangan penyidik KPK, Rabu (28/4/2021). Angin diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak.

KPK Tidak Akan Pandang Bulu

Penyidik KPK mengeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Gedung DPR, rumah dinas, dan rumah pribadinya untuk mendalami peran Azis dalam kasus dugaan suap penyidik KPK.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuktikan lagi untuk mendalami peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penyidik KPK, Stepanus Hoben Pattaju, oleh Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, M Syahrul.

Pada Rabu (28/4/2021) sore hingga malam penyidik KPK mengeledah ruang kerja politisi Partai Golkar itu, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Penyidik KPK juga mengeledah rumah dinas dan rumah pribadi Azis di kawasan Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, Rabu, sekitar 15 penyidik KPK mendatangi Gedung Nusantara III, sekitar pukul 1700. Keinginan mereka mengeledah ruang kerja Azis sempat terhambat oleh petugas pengamanan dalam DPR. Setelah memperoleh izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKHD), mereka bisa melaksanakan tugas. Mereka bergerak menuju ruang kerja Azis yang berada di lantai 4 gedung itu. Dalam pengeledahan, penyidik mengambil sebuah memo dan satu lembar foto kopi dokumen. Pengeledahan tuntas sekitar pukul 2200.

Adapun pengeledahan di rumah dinas Azis dimulai sekitar pukul 2000. Pamolan Kompas, pengeledahan berlangsung hingga sekitar pukul 2145. Belasan penyidik menggunakan tujuh mobil membawa sejumlah barang bukti dari dalam kediaman dengan koper berwarna hitam.

Ketua KPK, Firdi Bahari saat dihubungi membenarkan tim penyidik KPK melakukan pengeledahan di ruang kerja Azis dan rumah dinasnya. Bahkan,

bukan hanya di dua lokasi itu, penyidik juga mengeledah rumah pribadi Azis yang juga berada di Jakarta Selatan.

Lelaki lanjut KPK akan mendalami, mempelajari, dan menelaah barang bukti yang disita sebagai keterangan para saksi ataupun bukti lainnya. "Semua tindakan untuk menduga seseorang sebagai tersangka berdasarkan kecukupan bukti. KPK tidak akan pandang bulu dalam bertindak karena itu prinsip kerja kami," kata Firdi tegas.

Saat jumpa pers, Kamis (22/4), Firdi menyatakan adanya peran Azis dalam kasus suap penyidik KPK itu. Azis disebut-kannya mengenalkan Stepanus kepada Syahrul. Dalam kasus itu, Stepanus diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Syahrul agar penyidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai oleh KPK tidak di-naikikan ke tingkat penyidikan.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Gerindra, Habiburokman membenarkan adanya pengeledahan di ruang kerja Azis.

Tadi ada dari KPK, periksa ruangan Pak Azis. Sesuai tugas (tugas pokok dan fungsi) MKD, kami mendampingi," ucapnya.

Salah satu fungsi MKD menurut dia, mendampingi apabila ada pemeriksaan dan pengeledahan oleh aparat penegak hukum. "Intinya kami tidak mengintervensi kerja KPK, tetapi kami menjalankan fungsi pendampingan," pengeledahan," katanya.

Selain Habiburokman, Sekjen DPR Indra Iskandar meng-

ikuti proses pengeledahan. "Proses semua mulai dari KPK datang melalui mekanisme yang diatur dalam tata tertib melalui persetujuan dari pimpinan MKD kemudian didam-

pi," kata Indra.

Sejak namanya disebutkan KPK turut berperan dalam meng-

nalikan Stepanus dan Syahrul, Azis sudah selalu belum memberikan penjelasan kepada media. Begitu pula saat dihubungi oleh Kompas, Rabu malam, ia tidak merespons.

Langkah MKD ditunggu

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Korus, mengapresiasi KPK yang membuktikan lagi untuk mendalami peran Azis dalam kasus suap penyidik KPK.

"Upaya KPK memperjelas keterlibatan Azis merupakan

suatu langkah untuk terus menunjukkan independensi KPK dan upaya KPK untuk terus dipercaya oleh publik. Apalagi saat ini KPK di tengah tren penurunan kepercayaan publik akibat beberapa skandal yang dilakukan pegawai, seperti penyidik yang menerima suap dan kasus perscurian alat bukti di KPK," tuturnya.

Ia berharap upaya KPK ini terus dilanjutkan hingga peran Azis betul-betul terungkap.

Tak hanya itu, Lucius mendorong MKD memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh Azis. "Keseriusan DPR dalam mendukung pemberantasan korupsi ditunjukkan oleh sikap tegas mereka memproses secara etik anggota mereka yang diduga terlibat kasus korupsi. Jadi, bukan menutupi atau hanya mengalangi prosesnya," ujarnya.

Kasus suap pajak

Selain kasus dugaan suap penyidik KPK itu, KPK juga terus mendalami kasus dugaan suap dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Pada Rabu, KPK memeriksa bekas Di-

rektor Pemeriksaan dan Penegihan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji.

Angin diminta keterangan sebagai saksi selama sekitar empat jam. Sesuai diperiksa, Angin enggan menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan seperti materi pemeriksaan.

"Angin dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan 2016-2017 pada Ditjen Pajak," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Pemanggilan ini yang kedua kali. Pada panggilan pertama, 21 April, Angin tidak hadir dengan alasan sedang sakit. Selain Angin, saat itu, KPK memeriksa pula Kepala Biro Administrasi Keuangan PT Bank Panin Indonesia Tbk Marlina Gunawan.

Masih terkait kasus ini, KPK telah menyita berbagai barang bukti yang ditemukan saat tim penyidik mengeledah Kantor Bank Panin di Jakarta. KPK juga telah mengeledah sejumlah tempat lainnya, seperti Kantor PT Bontlin Barutama di Kalimantan Selatan dan PT Gunung Madu Plantations di Lampung. Pihak Imigrasi juga telah melakukan pengecekan untuk bepergian ke luar negeri terhadap dua aparat sipil negara Ditjen Pajak berinisial APA dan DPK. Selain itu, ada empat orang lainnya, yakni berinisial RAR, ADM, VL, dan AN yang juga dicegah ke luar negeri.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, berharap KPK tidak hanya menerima konsultan dan oknum pegawai pajak dalam kasus ini. KPK perlu pula memindai korporasi yang memerintahkan konsultan menyuplai pegawai pajak. (DPS:DAW)